

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

Oleh :

**RAJA AULIA DENVY PUTRI
NIM : 15622072**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RAJA AULIA DENVY PUTRI

NIM : 15622072

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : RAJA AULIA DEVNY PUTRI

NIM : 15622072

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Andry Tonnava, S.E., M.Ak.
NIDN. 8823900016/ Asisten Ahli

Pembimbing Kedua



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA.
NIDN. 1029127801/ Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,




Randy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH (SIMDA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENATATAN SIPIL
KABUPATEN BINTAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : RAJA AULIA DEVNY PUTRI
NIM : 15622072

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Andry Tonnaya, S.E., M.Ak
NIDN. 8823900016/ Asisten Ahli

Sekretaris,

Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Anggota,

Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN.1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, 26 April 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Guany Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Raja Aulia Devny Putri
NIM : 15622072
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.39
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 26 April 2021



Raja

RAJA AULIA DEVNY PUTRI
NIM : 15622072

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ

Alhamdulillah... alhamdulillahirobbil'alamin...

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan doa hambahambanya sehingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan.

Ku persembahkan sebuah karya yang sederhana ini kepada orang-orang tersayang yang begitu berarti,

Ayahku RAJA DEFRIANSYAH, Ibuku ARYANI KIDAM dan Adik Perempuanku RAJA AMELIA AGUSTINAWATI .

Atas doa, support, harapan kalian yang selalu menjadi alasan mengapa skripsi yang sederhana ini bisa selesai, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan surganya Nya.

Semoga skripsi ini dapat terus bermanfaat nantinya.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra'd : 11)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS. Al-Mujadalah : 11)

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahIrabbil'alamin, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan”**.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-I di Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan. Tanpa bantuan dari berbagai Pihak yang terkait, penulis akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.,Ak,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II dan Ketua Program studi S1 akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
4. Bapak Imran Ilyas, MM., Selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan TanjungPinang.
6. Bapak Andry Tonnaya, SE.M.Ak selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah bapak berikan.

7. Seluruh Dosen dan Staff di (STIE) Pembangunan TanjungPinang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingannya.
8. Bapak Drs.Ismail, M. Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan beserta seluruh pegawai disana yang telah memberikan izin dan membantu penulis melakukan penelitian.
9. Keluargaku tercinta Bapak, Ibu, dan Adik perempuanku, yang selalu terus memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
10. Teman kantorku yang tak pernah berhenti memberikan semangat terutama kepada Kak Nur, Bang Bayu, Bang dwe, Bang Luky, Dwi Dan Pak Purbo.
11. Teman sedari SMA ku Nurtia ,Ramadhona, Farah, Yana dan Fatma yang selalu memberikan dukungan dengan penuh perhatian demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman seperjuangan yang tak pernah berhenti memberikan segala do'a, dukungan dan masukan demi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada Nopus, Dani, Yunia, Murni dan Dewi.
13. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya, Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 26 April 2021

Penulis,

RAJA AULIA DEVNY PUTRI

NIM : 15622072

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Akuntansi	11
2.2 Sistem Informasi Akuntansi (SIA).....	12
2.2.1. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).....	14
2.3 Akuntansi Sektor Publik	16
2.3.1. Karakteristik Sektor Publik	18
2.3.2. Tujuan Sektor Publik	21
2.3.3. Elemen-elemen Sektor Publik	22
2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	25

2.4.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .	25
2.4.2. Peranan Penting Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	29
2.4.3. Tujuan Peranan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	31
2.4.4. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	32
2.4.5. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	33
2.4.6. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.....	37
2.4.7. Manfaat Penerapan Basis AkruaI.....	43
2.5 Pemerintah Daerah	47
2.5.1 Laporan Keuangan Daerah.....	47
2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah	49
2.5.3 Peranan Laporan Keuangan Daerah.....	51
2.5.4 Pengguna Laporan Keuangan Daerah	52
2.6 Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) ..	53
2.6.1 Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).....	57
2.6.2 Manfaat Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	57
2.6.3 Unsur Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	60
2.7 Output Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pada Akuntansi Pelaporan.....	61
2.7.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	61
2.7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)	65
2.7.3 Neraca	67
2.7.4 Laporan Operasional (LO)	69
2.7.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	71
2.7.6 Laporan Arus Kas (LAK).....	72
2.7.7 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	74
2.8 Peneliti Terdahulu	76
2.9 Kerangka Pemikiran.....	79

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	74
3.1	Jenis Penelitian.....	74
3.2	Jenis Data	75
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	77
3.4	Teknik Analisis Data.....	79
3.5	Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
4.1	Gambaran Umum Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	83
4.1.1	Sejarah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	83
4.1.2	Visi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	84
4.1.3	Misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	84
4.1.4	Stuktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	84
4.1.5	Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	86
4.2	Laporan Keuangan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	101
4.2.1	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	104
4.2.2	Laporan Realisasi Anggaran	105
4.2.3	Neraca	105
4.3	Analisis Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan Berbasis Akrual Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang	107
4.3.1	Pemahaman Makna dan Tujuan SIMDA Keuangan.....	107
4.3.2	Manfaat SIMDA Keuangan Kantor Dinas Kependudukan	

	Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan	109
4.4	Analisis Pembuktian Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan	110
BAB V	PENUTUP	162
	5.1 Kesimpulan	162
	5.2 Saran	162

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Defenisi Konseptual dan Defenisi Operasional	82
Tabel 4.1. SOP Pengajuan SPP/SPM-UP.....	113
Tabel 4.2. Skema Pengajuan SPP/SPM-UP.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	79
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan	85

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN.

Raja Aulia Denvy Putri, 15622072. S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Email : Rajadevny@gmail.com

Tujuan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk menganalisis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berupa output yang dihasilkan sudah sesuai atau belum penerapannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbasis akrual yang berpedoman pada PP 71/2010. Diantara lainnya juga untuk mengetahui apakah terdapat hambatan dalam penerapan tersebut.

Metode analisis data kualitatif penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis berupa perbandingan antara Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan PP 71/2010. Analisis secara perbandingan ini dapat ditemukannya kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam penerapan yang telah dilakukan serta untuk mengetahui kendala atau hambatan SIMDA keuangan dalam penerapannya dilakukan melalui wawancara secara langsung pada pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan secara umum belum diterapkan seluruhnya pada dinas terkait. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas, terdapat kendala pada aplikasi SIMDA Keuangan berupa sistem transfer data masih bersifat offline dengan cara ekspor dan import datanya dan adanya masa expired pada aplikasi.

Kesimpulannya sebaiknya mengusulkan perbaikan aplikasinya yang terintegrasi dan real time, serta masa berlaku aplikasi agar bisa digunakan secara terus-menerus, ditingkatkan penambahan SDM serta ditingkatkan lagi kualitasnya dengan pelatihan secara berkala, pengembangan dan pemahaman serta evaluasi laporan keuangan dalam penerapan PP 71/2010 yang berbasis akrual agar kedepannya dapat menerapkan secara keseluruhan dengan optimal.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, SAP Berbasis Akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

Dosen Pembimbing I : Andry Tonaya, SE., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak., CA.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF THE CAPUBATEN BINTAN.

*Raja Aulia Denvy Putri, 15622072. S1 Accounting
College of Economics (STIE) Tanjungpinang Development
Email: Rajadevny@gmail.com*

The purpose of research at the Department of Population and Civil Registration of Bintan Regency is to analyze the application of the Regional Financial Management Information System (SIMDA) in the form of outputs that are in accordance with or not yet applied to Government Accounting Standards based on accrual-based Government Regulations based on PP 71/2010. Among other things, it is also to find out whether there are obstacles in the implementation.

The method of qualitative research data analysis is descriptive and tends to use analysis. The analysis is in the form of a comparison between the Financial Statements at the Department of Population and Civil Registration of Bintan Regency with PP 71/2010. This comparative analysis can find suitability and discrepancies in the application that has been carried out and to find out the constraints or obstacles in SIMDA in its application through direct interviews with related parties.

Based on the results of research and discussion, it was found that in general it had not been fully applied to related agencies. This is because Human Resources are limited, there are problems with the SIMDA Finance application in the form of an offline data transfer system by way of exporting and importing data and there is an expiration period on the application.

The conclusion should be to propose improvements to the application that is integrated and real time, as well as the validity period of the application so that it can be used continuously, increase the addition of human resources and improve its quality with regular training, development and understanding and evaluation of financial reports in the application of PP 71/2010 based on accruals so that in the future it can be optimally implemented as a whole.

Keywords: *Budget Realization Report, Balance Sheet Report, Accrual Based SAP, Government Regulation Number 71 Year 2010, Regional Financial Management Information System (SIMDA).*

Supervisor I: Andry Tonaya, SE., M.Ak

Supervisor II: Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak., CA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlu kita ketahui dalam perkembangan sebuah teknologi pada umumnya sangat berpengaruh pada sektor publik maupun sektor non-publik. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam berbagai sektor merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia pada umumnya. Kemajuan informasi yang telah berkembang di Indonesia menuntut para instansi dan lembaga untuk ikut maju dalam hal teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi yang sudah maju menjadi sebuah kebutuhan dalam mendukung pekerjaan sehari-hari dalam sebuah instansi atau lembaga.

Sistem informasi serta teknologi menjadi sangat penting untuk era saat ini sehingga dapat berperan luas tidak terkecuali bagi organisasi lingkup pemerintahan atau sektor publik. Salah satu lingkungannya yaitu, pemerintah daerah. Perkembangan pada sistem teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia begitu pesat, hal itu dapat kita lihat dari dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui

peningkatan kemandirian pemerintahan itu sendiri, dapat membantu proses bisnis dan kegiatan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan efektifitas, efesiensi, komunikasi serta kolaborasi.

Untuk memwujudkan sistem informasi dan teknologi secara baik khususnya pada pemerintah daerah selaras dengan adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin lebih meningkat.

Selain itu organisasi sektor publik salah satunya pemerintahan daerah yang dapat mengkomunikasikan seluruh *output* yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan berupa laporan keuangannya kepada publik. Dimana pemerintah merupakan sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Selain itu organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat

menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang telah dibuat oleh Pemerintah seharusnya setiap – setiap instansi mampu mengolah, mempraktikkan dan menyajikan laporan keuangan tiap periode secara baik dan optimal.

Laporan keuangan yang disajikan dengan baik diperoleh dengan adanya *input* yang baik sehingga *output* yang dihasilkan juga maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dimana telah kita ketahui laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai keuangan dan apa saja hasil yang telah tercapai selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh perusahaan saja, melainkan setiap pemerintah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Tujuan dibuat laporan keuangan pada masing – masing organisasi terutama organisasi sektor publik yang digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada dibawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuannya ini digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik. Dalam penyusunan laporan keuangan di pemerintahan menggunakan pedoman yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sendiri, maka dari itu diperlukan standar pelaporan keuangan. Namun, selain Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman, proses penyusunan

laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat dan tentunya data yang dihasilkan haruslah akurat. Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem yang dapat merangkul pencapaian tersebut, yaitu dengan adanya dukungan teknologi informasi.

Upaya efisiensi, efektifitas serta produktifitas dalam kegiatan pemerintah termasuk pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antara lembaga pemerintah memerlukan penerapan teknologi informasi secara optimal dengan menerapkan Sistem Informasi yang baik. Sistem informasi manajemen yang menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan elektronik komputer membuat tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat dan menghemat waktu.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut mengatur tentang SAP yang berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas paling lambat diterapkan pada tahun 2015. Dan penerapannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terutama pada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan.

Oleh karena itu, guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan

setiap saat. Pemerintah pusat juga telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut. Salah satu langkah untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual yakni dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya pemerintah memperkenalkan SIMDA yang sebelumnya merupakan “ SIMDA Keuangan “ sekarang telah dibuat peraturan baru berupa “ SIMDA Berbasis Akrual “. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah serta guna membantu pengelolaan Keuangan Daerah baik ditingkat pelaporan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan ataupun ditingkat akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) entitas akuntansi. Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah serta dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan APBD juga pertanggungjawaban APBD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan merupakan objek didalam penelitian yang salah satu instansi pemerintah yang telah menggunakan standar berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menghasilkan laporan keuangan yang disajikan. Sebagaimana kita ketahui standar akuntansi berbasis akrual adalah standar akuntansi terbaru yang sebelumnya adalah berbasis kas. Yang membedakan hal ini adalah dalam metode pencatatannya. Basis akrual adalah metode pencatatan dalam akuntansi, yang mencatat semua transaksi baik kas sudah diterima ataupun yang belum diterima pada saat terjadinya transaksi

tersebut dilakukan. Dan sebagaimana kita ketahui penyusunan laporan keuangan adalah kewajiban setiap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ini jelas dapat membantu instansi pemerintahan, terutama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) setiap instansi dapat dengan mudah menginput data yang telah ada sehingga menghasilkan output yang akurat dengan tidak membuang 0 buang waktu yang terlalu lama. Hal ini karena, setaip instansi tidak perlu lagi mengerjakan secara manual yang harus benar - benar mengerjakan dari awal hingga akhir. Setiap angka – angka dan akun – akun akan terotomatis dengan sendirinya dengan datanya yang ada karena sudah terprogram.

Selain manfaat dan tujuan penerapan SIMDA Keuangan yang telah dipahami, pegawai juga harusnya memahami setiap *input* yang akan diolah atau diproses dengan menggunakan SIMDA serta *output* yang akan dihasilkan. Adapun *output* yang dimaksud adalah elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang berbasis akrual. Selain itu terlebih dengan adanya pengembangan sistem dan sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan SIMDA secara bertahap menyebabkan perluuya penyesuaian kembali. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengevaluasi lebih lanjut apakah Laporan keuangan yang telah dibuat dengan aplikasi SIMDA dan disajikan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah berbasis akrual dan bagaimana dengan kualitas informasi laporan keuangan yang menggunakan SIMDA dari output yang dihasilkan.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena tersebut membuat peneliti tertarik dengan objek penelitian tersebut. Sehingga untuk melakukan penelitian

lebih lanjut peneliti mengambil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan judul “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) output yang dihasilkan sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbasis akrual ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat atau kendala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan penelitian dilakukan agar permasalahan pada penelitian ini tidak meluas yaitu :

1. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun anggaran 2018.
2. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan SIMDA berdasarkan Peraturan Pemerintah yang Berbasis Akrual terutama hanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian atas penyajian laporan keuangan yang output dihasilkannya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah yang berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat atau kendala apa saja dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini dilakukan diharapkan memberikan manfaat diantaranya yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dibuat pertama bermanfaat bagi pihak

permerintah. Dimana hal digunakan sebagai bahan masukan serta dapat menjadi sebuah gambaran pencapaian keberhasilan pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam pengelolaan anggaran dengan menggunakan aplikasi SIMDA bagi instansi Pemerintah terutama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

2. Bagi Peneliti

Terutama untuk menambah wawasan terutama mengenai bidang akuntansi sektor publik. Khususnya mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

3. Bagi Akademisi

Berguna halnya juga pada pembaca terutama untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau referensi di penelitian selanjutnya dibidang akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini berguna bagi pembaca untuk mengetahui tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan permasalahan maupun fenomena yang dimuat ke dalam latar belakang permasalahan,

rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian juga termasuk pada bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti atau yang dianalisis sebagai landasan serta kerangka berfikir dan juga memuat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Ilmu Akuntansi memiliki peranan penting dari berbagai aspek. Untuk bisa mempelajari suatu ilmu, tentu saja kita harus memahami pengertian dan maksud dari ilmu tersebut. Termasuk juga dalam ilmu akuntansi. Sangat penting diketahui dan dipahami apa itu akuntansi. Secara umum, akuntansi yang teah kita ketahui berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jika pengertian tersebut telah benar-benar dipahami dengan baik, maka akan mudah mempelajari poin-poin selanjutnya dari akuntansi.

Akuntansi dengan proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan komprehensif selama periode tertentu. Sebagai suatu proses merangkum, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tidak lupa melalui proses atau siklus akuntansi. Biasanya transaksi yang terjadi dengan persetujuan antara dua pihak, dimana salah satu pihak menjual barang atau jasa, sedangkan pihak lain membeli barang atau jasa tersebut. Sebuah transaksi harus bisa diukur nilainya dengan uang atau dengan kata lain bisa dinyatakan dalam mata uang. Berikut dijelaskan pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai literturnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Taswan (2015:5) mengemukakan bahwa akuntansi bisa didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Sofyan Syafri (2013:5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Maka dari itu dapat kita ketahui akuntansi berupa proses pencatatan, pengklasifikasian, mengukur, serta menyampaikan informasi atas transaksi yang terjadi dengan pelaporan dan penyajian laporan dengan adanya suatu kegiatan yang berfungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Bagian terpenting yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaan diantaranya adalah informasi akuntansi. Salah satu informasi akuntansi adalah berupa data-data keuangan. Data keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan harus disajikan dalam bentuk yang baik. Untuk melakukan semua itu diperlukan sistem yang mengatur arus dan pengolahan data akuntansi yang biasa disebut sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. Banyak para ahli dalam bidang akuntansi yang memberikan definisi mengenai sistem informasi akuntansi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Diana (2011:4) definisi dari sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Memproses transaksi yang dimaksud bisa berupa mencatat aktivitas pengeluaran kas ke dalam jurnal.

Sedangkan sistem informasi akuntansi juga didefinisikan oleh Bodnar dan Hopwood (2010:1) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf mengemukakan bahwa Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi.

Dan menurut Azhar Susanto (2017:80) Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah

keuangan menjadi informasi keuangan.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem informasi akuntansi juga dapat disimpulkan sebagai sub-sub sistem yang paling saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari data transaksi untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengambilan dan pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan.

2.2.1 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem yang dirancang dan ditetapkan dalam suatu usaha perusahaan secara umum bertujuan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Berikut dibawah ini tujuan SIA menurut ahli.

Menurut Diana (2011:5), manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi yaitu :

1. Mengamankan harta/kekayaan perusahaan. Harta/kekayaan di sini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan. Tidak ada pemilik yang senang jika uang perusahaan dicuri orang (entah itu karyawan maupun orang asing).
2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang apa yang diminta oleh konsumen. Membeli barang dagangan yang kurang laku

berarti kas akan terjebak dalam persediaan (yang sulit laku tersebut) dan berarti kehilangan kesempatan untuk membeli barang dagangan yang laku.

3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.
5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan). Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit (pemeriksaan).
6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran kas.
7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selain berguna untuk membandingkan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan biaya standar dengan kenyataan seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tujuan sistem informasi akuntansi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi selain berguna sebagai penghasil informasi yang cepat, tepat dan akurat juga berguna dalam menjaga kekayaan perusahaan karena dengan adanya sistem informasi akuntansi, semua prosedur yang dijalankan perusahaan dapat diawasi. Selain itu dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pemakai internal atau eksternal informasi akan lebih akurat karena informasi yang

dihasilkan lebih rinci. Penggunaan sistem informasi akuntansi dengan bantuan teknologi komputer atau sistem komputerisasi tentunya akan lebih membantu dan lebih efektif dan efisien karena pengolahan data lebih cepat dan dengan adanya bantuan dari basis data, perusahaan dapat melihat data yang diolah atau informasi masa lalu milik perusahaan untuk kepentingan pemeriksaan (audit). Anggaran perusahaan juga dapat dibuat berdasarkan informasi dari sistem informasi akuntansi yang telah diolah dan disajikan

2.3 Akuntansi Sektor Publik

Telah kita ketahui dalam sebuah ilmu akuntansi komponen akuntansi dapat dibagi menjadi dua komponen, diantaranya akuntansi non-publik dan akuntansi publik. Sektor publik dapat dikatakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri, karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba (*profit*), dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba melainkan tergolong pada organisasi nirlaba.

Dapat dilihat dari perkembangannya sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar merupakan organisasi pemerintah (*government*), baik dikategorikan sebagai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Awalnya sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang dan layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pengurus tertentu. Kemudian masyarakat membayar sejumlah upeti (pajak) untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut. Akuntansi yang bersifat pemerintahan atau *non-profit* digambarkan sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan.

Istilah sektor publik dalam teorinya memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik itu sendiri, sehingga setiap disiplin ilmu baik politik, ekonomi hukum dan sosial memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Berikut pendapat para ahli mengenai akuntansi publik.

Menurut Indra Bastian (2010:3) yang dikutip dari salah satu literturnya mendefenisikan akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di berbagai lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut Halim dkk (2012:40) mengemukakan bahwa akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan

transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Sedangkan menurut Deddi, dkk (2012:4) akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat. Hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan, mekanisme, tehnik, alat informasi akuntansi yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan yang kemudian diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta yang berguna untuk pengambilan keputusan serta pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

2.3.1 Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut haruslah memiliki manfaat. Akuntansi sektor publik berupa sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik

sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan yang berasal dari masyarakat agar dapat dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Dalam pengelolaan keuangan negara, setiap tahunnya jumlah yang harus dikelola semakin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Sejalan dengan hal itu, permasalahan harus ditangani semakin kompleks. Volume dana yang harus dikelola pemerintah dan transaksi yang harus diselesaikan semakin beragam dan semakin besar, salah satu contohnya dapat kita lihat adalah kenaikan gaji pegawai negeri yang terjadi setiap tahunnya.

Permasalahan yang terjadi menuntut pemerintah untuk menyempurnakan sistem akuntansi pemerintahan. Hal itu bertujuan agar pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan dengan lebih baik sehubungan dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baru, diharapkan proses pengolahan data transaksi akan menjadi lebih cepat, lengkap, tertib dan akurat. Pada gilirannya pemerintah akan menyajikan informasi – informasi keuangan dengan cara yang lebih tepat dan cepat serta bermanfaat secara lebih optimal.

Dalam sebuah akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Hal ini dapat kita lihat penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan menurut ahli.

Menurut Halim (2012:40), mengutarakan bahwa karakteristik akuntansi sektor publik diantaranya :

1. Berbeda dengan akuntansi bisnis
2. Tidak ada laporan laba
3. Anggaran merupakan plafond
4. Menggunakan lebih dari satu dana
5. Sangat bergantung pada Undan[-Mg – Undang
6. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan neraca.

Sedangkan menurut Sarwenda Biduri (2018:5) mengatakan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi L

- a. Faktor ekonomi meliputi; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur dan pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP).
- b. Faktor politik meliputi; hubungan negara dan masyarakat, legimitasi pemeirntah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional serta kelembagaan.
- c. Faktor kultural meliputi antara lain; keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat dan tingkat pendidikan.
- d. Faktor terkakhir yaitu demografi meliputi; pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi dan tingkat kesehatan.

Dari penjelasan yang dikemukakan para ahli diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik akuntansi sektor publik ialah akuntansi yang

berbeda dengan akuntansi swasta atau non-publik karena tidak terdapatnya laporan laba atau tergolong non-profit yang meliputi berbagai faktor komponen dari segi ekonomi, politik, kultural dan demografi.

2.3.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Di Indonesia sendiri, Akuntansi Sektor Publik diciptakan untuk menciptakan kondisi Transparansi, Akuntabilitas Publik, Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis. Kondisi transparan artinya informasi pelaporan tersebut disajikan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga menghindarkan spekulasi tertentu yang mungkin terjadi.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Akuntansi sektor publik yang terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi publik.

Menurut Halim, Kusufi (2012:39) Akuntansi Pemerintahan mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan tanggungjawab memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap

orang atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari akuntansi sektor publik yaitu sebagai pertanggungjawaban, manajerial, sebagai pengawasan dan digunakan untuk membuat akuntabilitas keuangan negara semakin baik.

2.3.3 Elemen – elemen Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sebuah mekanisme teknik beserta analisa akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat. Penerapan pengelolaan dana masyarakat ini diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya. BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, dan proyek kerja sama sektor publik dan swasta juga menerapkan akuntansi ini. Dalam sebuah elemen akuntansi sektor publik, ada beberapa bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Elemen akuntansi sektor publik sangat dibutuhkan karena elemen-elemen akuntansi sektor publik

bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagian bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Perencanaan Publik, yang memiliki makna bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.
- b. Penganggaran Publik Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan nmanajer publik secara bertahap dan sistematis.
- c. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang elah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
- d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

- e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Audit Sektor Publik Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- g. Pertanggungjawaban Publik Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

Dari pendapat ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik berupa perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik dan pertanggungjawaban publik.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.4.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberikan nomor, judul, isi dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintah (SAP) menurut para ahli yang dikutip dari berbagai literturnya.

Menurut Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:137) menjelaskan bahwa pengertian standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Hal senada dikatakan pula oleh Baldrice Siregar (2015:72) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Halim (2010:47) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP.

Menurut Hasibuan (2015:54) Penggunaan Laporan Keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dan dijelaskan juga pada pasal 1 ayat (11) SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dengan kata lain menurut Hasibuan (2015:55), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). Pada lampiran Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 ini disajikan kerangka konseptual dan 12 PSAP. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 berisi 3 lampiran yang intinya membahas tentang ketentuan-ketentuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah. Lampiran kedua membahas tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan lampiran ketiga membahas tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Laporan keuangan pemerintah terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut SAP adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyajikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah dapat mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaanya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

Akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasikan kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya yang digunakan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian berdasarkan pengertian-pengertian diatas baik menurut para ahli atau sumber-sumber literatur lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2.4.2 Peranan Penting Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang di pelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia,kebutuhan standar akuntansi pemerintah kembali menguat, oleh karena itu,badan keuangan Negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi.seperti organisasi komersial (commercial organization), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain.

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya terdiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakatluas.Dengan di tetapkan PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.Hal ini menandai di mulainya suatu era baru dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan akuntabilitas.

Selain itu, terdapat peranan yang memiliki hubungan terkait satu sama lain diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Pada dasarnya, pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Besar kecilnya dana yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mencerminkan peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan masyarakat suatu negara atau daerah. Dengan demikian, besar kecilnya peranan akuntansi pemerintahan pada pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan besar kecilnya nilai APBD.

2.4.3 Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2010:1) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan digunakan sebagai acuan bagi:

1. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Dari pernyataan diatas ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2010:2) lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintah :

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan meliputi;

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan diantaranya bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, adanya pengaruh proses politik, dan hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah.

Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian diantaranya; anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendaliannya, investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan serta kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

2.4.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Setiap aturan yang dibuat oleh pihak manapun pasti memiliki manfaat bagi pihak-pihak terkait begitu juga pada Standar akuntansi pemerintah (SAP) diterapkan dilingkup pemerintahan, baik dalam pemerintah pusat, kementerian – kementerian dan pemerintah daerah (PEMDA) beserta dinas lainnya. Penerapan Standar akuntansi pemerintah (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintah pusat dan daerah. Dapat dikatakan berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Fakhurrazi (2010:15) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu dalam lingkup manajemen dapat mempermudah fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiaya seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.4.5 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam setiap standar akuntansi pasti memerlukan indikator sebagai ukuran dalam standar yang telah dibuat. Dengan perlunya indikator tersebut dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka ada pendapat para ahli yang mengemukakan pentingnya hal ini yang dikutip penulis dari literturnya yaitu Menurut Baldrice Siregar (2015:79), Abdul Hafiz Tanjung (2015:82) Erlina (2015:11) dan PP No. 71 Tahun 2010, pernyataan standar akuntansi pemerintah sebagai berikut :

a. PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan

Pada PSAP 1 diuraikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta struktur dan isi laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan terdiri dari 7 yaitu : Laporan

realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

b. PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran

Pada PSAP 2 ini mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran. Isi PSAP 2 ini meliputi struktur dan isi laporan realisasi anggaran serta akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit LRA, akuntansi pembiayaan, akuntansi pembiayaan netto, dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

c. PSAP 3 Laporan Arus Kas

Sedangkan pada PSAP 3 ini mengatur tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan kas awal periode, sumber dan penggunaan kas, serta saldo kas akhir periode. Arus kas terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu diantaranya adalah arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan dan arus kas aktivitas transitoris.

d. PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Isi PSAP ini meliputi ketentuan umum serta struktur dan isi informasi dalam catatan atas laporan keuangan.

e. PSAP 5 Akuntansi Persediaan

PSAP 5 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Persediaan adalah aset lancar

dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

f. PSAP 6 Akuntansi Investasi

PSAP 6 mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi. Isi PSAP ini meliputi klasifikasi investasi dan pengakuan investasi. Pengertian investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dibagi menjadi 2 yaitu ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pengakuan investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.

g. PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap

PSAP 7 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap seperti klasifikasi aset tetap yang mengklasifikasikan aset pemerintahan yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Selanjutnya ada pengakuan aset tetap yang diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan dinilainya dapat diukur dengan handal, kriterianya seperti berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari setahun, harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, dan diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan.

h. PSAP 8 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 8 isinya adalah kontruksi dalam pengerjaan dan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya pengakuan konstruksi dalam

pengerjaan yang diakui ada 3 yaitu, diantaranya besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Lalu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehannya.

i. PASP 9 Akuntansi Kewajiban

PSAP 9 isinya meliputi klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, dan pengukuran kewajiban. Klasifikasi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Selanjutnya pengakuan kewajiban yaitu kewajiban yaitu kewajiban dapat diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yaitu kemampuannya

j. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Selanjutnya perubahan kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perubahan bisa terjadi apabila ada perubahan dari perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Lalu ada perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru atau perkembangan lainnya. Dan yang terakhir ada operasi

yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan lainnya.

k. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Isi dari PSAP 11 ini mengenai penyajian laporan keuangan yaitu adalah laporan keuangan yang bersifat konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas ekonomi meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan operasional
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas laporan keuangan

2.4.6 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Konsep Dasar Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Konsep Dasar Akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas dan basis akrual.

Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena

seluruh arus sumber daya dicatat.

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari penjelasan tersebut diatas dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca. Jadi sebenarnya dari tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual.

Menurut Widjarso yang dikutip dari literturnya mendefenisikan alasan penggunaan basis akrual pada laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yaitu laporan keuangan yang menggunakan akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi pada non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat

disarankan untuk digunakan dalam laporan keuangan karena lebih efektif dan akurat.

Akuntansi berbasis akrual yang mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 akan lebih akurat dalam menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. Jadi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sangat disarankan dalam laporan keuangan sebagai pedoman.

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 3 buah lampiran, yaitu Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual, Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lampiran 1 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen terdiri atas Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada sistem akuntansi sekarang telah banyak berbagai instansi pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Dengan penerbitan peraturan pemerintah yang baru berfungsi untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Selain itu basis akrual diterapkan untuk mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perlahan.

Cara pembukuan pada basis akrual membukukan pendapatan saat timbulnya atau terjadinya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan sudah atau belum. Basis akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang.

basis akrual akan mempunyai / meliputi semua aktivitas dibandingkan basis kas

Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. PP No. 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah di sampaikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) (2010) adalah : Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kasa atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumberdaya dicatat. Berikut dibawah ini opini para ahli menurut para ahli yang dikutip dari literturnya masing-masing.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:53) berpendapat bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat di penuhi oleh basis cas,tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Menurut Tickell, Geoffrey (2010:9) akuntansi berbasis akrual merupakan transaksi yang diakui pada saat pendapatan dihasilkan dan saat telah terjadinya beban.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:11), Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Jan Hoesada (2015:78), Basis Akrual merupakan basis akuntansi yang pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau arus kas masuk tunai, atau belakangan atau pendapatan kredit), dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul walau belum dibayar)

Sedangkan menurut pendapat Siregar (2015:78) basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dari pemaparan pengertian dia atas pengertian basis akrual dapat di simpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi dimana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya pristiwa,tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

2.4.7 Manfaat Penerapan Basis Akrual

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash towards Accrual*), dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual. Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena

akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas.

Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan

informasi kepada pengguna. Dengan laporan keuangan berbasis akrual pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha. Dalam masa transisi sampai dengan 2015, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, Sonny Loho, kendala implementasi standar akuntansi pemerintah antara lain adalah SDM yang berkompeten di bidang akuntansi, ketersediaan sarana/prasarana, ketersediaan anggaran, kapasitas manajemen, kemauan politik.

Sementara itu strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan peraturan tersebut adalah komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyediaan SDM yang kompeten, peranan APIP sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, pengelolaan BMN/BMD, mengintensifkan *rewards and punishments*, diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit.

Selain itu, di dalam buku modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual yang diterbitkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2014:15), adapun keunggulan dan kekurangan dari akuntansi basis akrual adalah sebagai berikut :

- a. Keunggulan Basis Akrual yaitu menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat, sebagai penilaian kinerja yang lebih akurat dalam

satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah, dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik, berguna sebagai pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik, Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan UU, Sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics-2001 (GFS 2001) yang berbasis akrual, Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun, menyelaraskan/Meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan, mewaspadaai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda, memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa, Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor, memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas, mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.

- b. Kekurangan Basis Akrual yaitu Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai. Menurut Widjajoso (2008) menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain: Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Akuntansi berbasis akrual menyediakan

informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2.5 Pemerintah Daerah

2.5.1 Laporan Keuangan Daerah

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan.

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah. Tiap-tiap daerah merupakan satu entitas-entitas yang akan membuat laporan keuangannya dan akan diserahkan ke Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat yang juga sebagai suatu entitas akan menggabungkan laporan keuangan daerah-daerah tersebut kemudian membuat laporan keuangan Negara RI yang telah dikonsolidasikan sesuai dengan PSAP Nomor 11.

Berikut ini menurut para ahli tentang defenisi laporan keuangan yang dikutip dari berbagai literatur baik dari laporan keuangan itu sendiri dan laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintah..

Menurut Mahmudi (2016 :13) mendefinisikan laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Heri (2012 : 2) mendefinisikan laporan keuangan yaitu laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 21) tentang laporan keuangan daerah ialah laporan keuangan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak - pihak yang memerlukan.

Sedangkan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan : “ Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung didalam komponen laporan keuangan.” Berdasarkan pemahaman dari berbagai defenisi diatas mengenai Laporan Keuangan daerah yaitu bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai dengan kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 24, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan, terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola.

Secara spesifik, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- d. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.5.3 Peranan Laporan Keuangan Daerah

Kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban dan peran untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

- c. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

- d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

f. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan

2.5.4 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu terdiri dari masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksa, selain itu ada pula pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah.

2.6 Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Keuangan Daerah disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan informasi yang cepat dan tepat. Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi

pemerintah daerah dari tingkat provinsi , kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. SIMDA terdiri dari aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah.

Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Program SIMDA yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangsn daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan, yaitu dengan sistem yang mampu mengolah data data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan.

Alat ukur SIMDA merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam

pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya yaitu pada objek penelitian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Aplikasi ini digunakan sebagai basis sistem informais keuangannya. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga aistensi dan proses-proses yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dengan diadakannya pengimplementasi SIMDA dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang lebih akurat. Menyusun laporan keuangan lebih efesien, dapat menyimpan data keuangan untuk manajemen lainnya, menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efesien yang akan dugunakan oleh pengguna laporan, mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi electronic data processing (EDP) audit.

Jika SIMDA diterapkan pada tiap - tiap instansi dapat memiliki keunggulan atau nilai tambah dimana output/laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dan validasi inputan data lebih terjamin.

Menurut M. Khoirul Anwar (2004:112) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi

bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik.

Menurut Andini Kusuma Dewi (2014) definisi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Definisi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Menurut Sukirman Djaja dalam Halens Ryanlie Ole (2014) Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah."

Sedangkan SIMDA menurut Forum Studi Keuangan Negara (2017:270) SIMDA adalah salah satu aplikasi yang sudah bisa digunakan beberapa sistem informasi keuangan di daerah untuk pengiriman data.

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah sebuah sistem manajemen informasi pemerintah daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).sebagai pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi guna membantu

pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

2.6.1 Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Menurut Ahmadi Aidi (2014:131) serta dalam (BPKP, 2008) Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah
3. Sistem informasi operasi sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

2.6.2 Manfaat Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintergerasi (BPK,2008) adalah sebagai berikut :

1. Database terpadu,tidak perlu input berulang-ulang data yang sama,
2. Data yang sama akan tercetak dan recek secara otomatis (validasi data aman); dan
3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi dengan kebutuhan dimana:
 - a. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 - b. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/kebijakan.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan, dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
2. Kesenambungan Maintenance, dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.
3. Transfer of Knowledge Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.
4. Terintegrasi SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis.

Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

Selain memiliki manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA memiliki fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan (BPKP, 2008) yaitu :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
- b. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
- e. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual
- f. Menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

Sedangkan adapun Keunggulan atau nilai tambah yang di tawarkan SIMDA keuangan adalah :

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksible,dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih tearjamin;
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas;

5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan]
6. Memfasilitasi akuntansi penggunaan anggaran.

2.6.3 Unsur Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu :

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik;
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (BPKP,2008) adalah :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- 2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d. Surat Tanda Setoran (STS)
 - e. Register
 - f. Surat pengendalian lainnya.

Program Aplikasi SIMDA keuangan didukung dengan :

- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran
- b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan
- c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
- d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA keuangan.

2.7 Output Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pada Akuntansi Pelaporan

2.7.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang berfungsi sebagai alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik, alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik, alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan, alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran, sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Pada sektor publik anggaran berperan besar untuk pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial sebagai instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Setiap anggaran yang diestimasi pasti harus memiliki laporan yang disebut yaitu laporan realisasi anggaran. Gunanya laporan realisasi anggaran ini untuk menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandinga antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disajikan berdasarkan PSAP Nomor 02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas. Biasanya laporan realisasi anggaran menyajikan informasi dengan struktur realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Melalui informasi yang dihasilkan akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi dan akuntabilitas publik. Dengan laporan realisasi anggaran tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan pelaporan terhadap anggaran dengan adanya penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Berikut dibawah ini diuraikan penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli yang dikutip dari literturnya masing-masing yaitu :

Menurut Siregar (2015:82) mendefenisikan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Dimana realisasinya berdasarkan pelaksanaan APBN/APBD menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Menurut Munandar (2012:90) mengemukakan bahwa laporan realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode – periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 23) tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintahan lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Laporan realisasi anggaran pada komponen transfer

yaitu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dikemukakan oleh Siregar (2015:82).

- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Berdasarkan dari defenisi – defenisi tersebut oleh beberapa ahli penulis menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget, laporannya menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Struktur Laporan Perubahan SAL baik pada pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 41) tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah :

“Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo anggaran lebih akhir.”

Menurut Siregar (2015:83) Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menunjukkan perubahan dari saldo anggaran lebih dalam suatu periode.

Saldo anggaran lebih(SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan akun berjalan serta penyesuaian lainnya yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan lain-lain
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut oleh beberapa ahli penulis menyimpulkan bahwa laporan perubahan saldo lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara komparatif.

2.7.3 Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan (balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Pada laporan neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam 2 kategori yaitu, aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi 2 kategori pula yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas mempunyai aset yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintah, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan

yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non-lancar). Berikut di bawah ini definisi neraca menurut beberapa ahli.

Menurut Kasmir (2016:28) menyatakan bahwa definisi laporan neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu Perusahaan.

Menurut Sudana (2011:15-18) neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Pada neraca tampak posisi aktiva, yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan, dan pasiva, yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan, dan pasiva, yang merupakan sumber sumber keuangan untuk mendanai investasi aktiva tersebut pada suatu saat tertentu

Menurut Sjahrial (2012:25) neraca (balance sheet) menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Pedoman susunan pos-pos dalam Neraca adalah sebagai berikut: Sebelah Aset, Pos yang lebih likuid berada disebelah atas, makin ke bawah makin tidak likuid. Sebelah Pasiva, Pos yang jangka waktu pengembalian nya lebih cepat berada disebelah atas, makin ke bawah makin lama jangka waktu pengembalian nya. Pedoman ini harus dipatuhi agar dalam melakukan analisis laporan keuangan dapat dilakukan secara benar dan tepat.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 42) neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.”

Dari defenisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan dengan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang memiliki pos – pos atau unsur – unsur dalam pelaporannya.

2.7.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 63) tentang Laporan Operasional adalah :

“ Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi.
- b. Beban dari kegiatan operasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- c. Transfer. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus dan defisit dari kegiatan nonoperasional, bila ada.
- e. Pos luar biasa. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- f. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban.”

Menurut Oman Rusmana (2017 : 85) tentang Laporan Operasional adalah untuk mencatat transaksi yang terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan beban. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal LO adalah seluruh transaksi yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu entitas, termasuk di dalamnya adalah transaksi-transaksi yang merupakan bagian dari basis akrual.

Dari defenisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu entitas.

2.7.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 70) tentang Laporan Perubahan Ekuitas adalah: “Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini :

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan menndasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.”

Menurut Baldric Siregar (2015 : 84) Laporan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun laporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas disusun oleh intensitas akuntansi dan entitas pelaporan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Suplus/defisit LO pada periode bersangkutan
3. koreksi-Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

Dari defenisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

2.7.6 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 70) tentang Laporan Arus Kas adalah :“Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, pengeluaran dan transitoris yang menggambarkan saldoawal selama periode tertentu.

a. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber-sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian utang jangka panjang.

d. Aktivitas Transitoris/nonanggaran

Arus kas dari aktivitas transitoris/nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

Menurut Oman Rasmna (2017:89) Laporan Arus Kas adalah laporan yang disusun dengan cara mengklarifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar ke dalam kategori aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Dan terdapat dua macam metode untuk menyajikannya, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Sementara dalam metode tidak langsung terdapat penyesuaian nilai arus kas berdasarkan kenaikan/penurunan akun-akun yang terkait dengan Laporan Operasional.

Dari definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasi, pendanaan, pengeluaran dan transitoris yang menggambarkan saldo awal selama periode tertentu, dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

2.7.7 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 80) tentang Catatan atas Laporan keuangan sebagai berikut :“Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi 46 Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.”

Menurut Baldric Siregar (2015 : 85) Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan Perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang di pergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari defenisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan ArusKas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainnya.

2.8 Peneliti Terdahulu

1. Astuty Veronika Laura, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Kabupaten Maluku Tenggara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan aplikasi SIMDA dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil dari penelitian ini adalah penunjang penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Peranan LKPD, Sistem Pengendalian Internal, Komunikasi, Komitmen, sedangkan Sumber Daya Manusia menjadi faktor penghambat penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Mohammad Alfian (2014) Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD (penelitian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo)”. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan untuk mengetahui faktor pendukung implementasi SIMDA pada SKPD dan menguji adanya pengaruh implementasi SIMDA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan pada lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat SIA yang terintegrasi dengan TI yang digunakan oleh organisasi dalam pengolahan data yang ada tidak berjalan dengan baik dapat menghasilkan output yang dapat melemahkan kinerja dari organisasi tersebut. Selain itu menyatakan bahwa Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

3. Trivena Anastasia Rahantoknam, Jantje J. Tinangon, Lidya M. Mawikere (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi SIMDA keuangan di BKAD Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum staff BKAD Kabupaten telah memahami makna keuangan SIMDA. Faktor-faktor mendukung implementasi implementasi keuangan SIMDA yaitu komunikasi, sikap / disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.
4. Mitami (2013), dengan judul “Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada pemerintah daerah

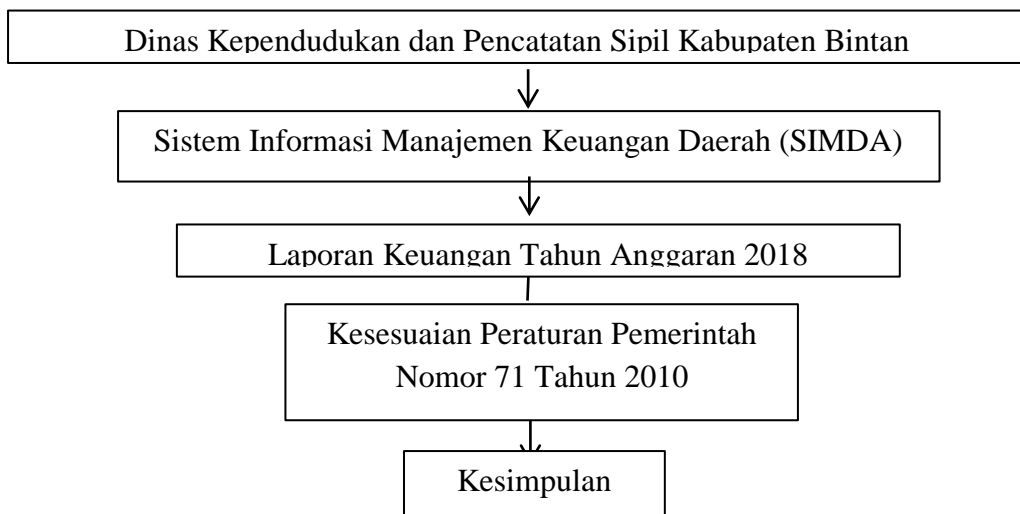
kabupaten pangkep”, menggunakan metode deskriptif fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai DPKAD Pangkep sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang penerapan SIMDA keuangan yaitu integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan.

5. Nugraha (2013), dengan judul “Analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)”, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Data Olahan Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yang termasuk penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan, juga fenomena serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini biasanya menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya, peneliti tidak memanipulasi dan peneliti juga tidak berpengaruh terhadap dinamika obyek. Instrumen dalam penelitian kualitatif ialah orang atau *human instrument* yakni peneliti sendiri yang mana harus memiliki bekal

pengetahuan dan teori yang luas agar mampu mengajukan pertanyaan, mengambil gambar, menganalisis, dan mengkonstruksi keadaan sosial menjadi jelas dan bermakna.

Pada penelitian ini akan digambarkan secara sistematis tentang kesesuaian dan ketidakesesuaian penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan output yang dihasilkan apakah sudah sesuai Standar Akuntansi yang berbasis akrual, faktor pendukung dan penghambat atau kendala selama dalam penerapan SIMDA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Selain itu peneliti akan menggambarkan secara rinci bagaimana kualitas informasi SIMDA tersebut. Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan sesuai fakta dengan laporan yang disajikan pada objek penelitian yang diteliti.

3.2 Jenis Data

Setiap penelitian pasti peneliti memerlukan data. Untuk kita ketahui data adalah bahan yang akan diolah sesuai metode penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan sebuah informasi dari suatu pengamatan, bisa berupa angka atau sifat, fakta dan bukti. Dengan adanya data dapat memberikan gambaran suatu keadaan atau persoalan pada suatu objek.

Maka, untuk penelitian ini menggunakan data berupa primer dan sekunder;

1. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli langsung yaitu dari informan, baik dari individu atau perorangan. Data yang diperoleh merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah: data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain”.

Pada penelitian ini diperoleh data primer berupa wawancara untuk mengetahui kendala-kendala atau faktor penghambat serta pendukung apa saja selama penerapan SIMDA ini dilaksanakan, apakah output yang dihasilkan oleh SIMDA sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual yang seharusnya. Sehingga dengan penelitian ini dapat diperoleh kualitas informasi SIMDA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Selain data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis juga memperoleh data sekunder untuk mendukung penelitian.

2. Data sekunder

Data Sekunder biasanya data yang diambil bersifat data yang telah diolah sebelumnya yang bersumber dari objek penelitian. Sedangkan pada data primer data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Pada objek ini peneliti mengambil data sekunder yaitu laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya tahun anggaran 2018. Yang mencakup diantaranya yaitu, laporan realisasi anggaran dan neraca.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik atau cara untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adanya faktor – faktor yang menentukan keberhasilan suatu penelitian salah satunya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat, jadi data penelitian yang diharapkan bisa diperoleh dengan menggunakan metode atau tehnik tertentu. Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan sebuah langkah-langkah strategis, karena prioritas utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Sugiyono (2013:224), mengemukakan bahwa tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Sujarweni (2012:40) metode pengumpulan data merupakan suatu cara. atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan panyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara, teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dimana menurut Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.

Sedangkan menurut P. Joko Subagyo (2011:39) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

mengungkapkan pertanyaan – pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Pada wawancara ini, peneliti akan mengadakan wawancara langsung pada pihak – pihak yang terkait diantaranya seperti pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan dan yang menggunakan aplikasi SIMDA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

2. Penelitian langsung yaitu menurut Sugiyono (2015: 204) observasi atau penelitian langsung merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasasri, 2010 : 9) kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang – ulang. Selain itu menurut para ahli yaitu Hadi Nurkencana (dalam Suardeyasasri 2010 : 9) mengemukakan bahwa observasi atau pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.
3. Dokumentasi yaitu menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen

tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

4. Studi Pustaka, yaitu menurut Nazir (2013:93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:330) tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang di ambil pada penelitian ini bersumber dari perpustakaan dan internet. Kegiatan ini merupakan bagian yang penting dari pendekatan ilmiah yang harus dilakukan dalam setiap penelitian ilmiah dalam suatu bidang ilmu.

3.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa data primer dan sekunder diantaranya yaitu :

1. Wawancara

Metode wawancara dan observasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Wawancara dilakukan langsung dengan Kasubbag Keuangan dan Staff selaku pembuat laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA keuangan.

2. Analisa Laporan Keuangan

Sedangkan analisa laporan keuangan dilakukan dengan pengamatan langsung pada proses entry data anggaran di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Data sekunder antara lain diperoleh dengan dokumentasi dan laporan keuangan. Fakta yang terkumpul, disusun, dijelaskan dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Dalam menganalisis data laporan keuangan, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2018, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan Output yang dihasilkan oleh sistem aplikasi SIMDA dengan SAP yang berbasis akrual. Dimana laporan keuangan ini dianalisis dengan menggunakan patokan/pedoman SAP yang berbasis akrual.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA Keuangan.

3. Reduksi Hasil Wawancara yang telah disajikan

Data yang diperoleh dari hasil wawancara cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan terinci. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta menyisihkan hal yang tidak perlu. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

4. Analisa Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Setelah dilakukannya analisa terhadap data laporan keuangan yang ada, penulis melakukan analisa laporan keuangan apakah telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual.

5. Menyajikan hasil wawancara

Pada point ini penulis akan menyajikan hasil wawancara yang dilakukan di awal, untuk dideskripsikan secara rinci sebagai data pendukung penelitian.

6. Menyimpulkan hasil wawancara dan Analisa dari uji kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemuka bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang diketemukan pada awal didukung oleh bukti-buktinyang valid dan konsisten pada saat wawancara dan analisa, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga dengan kesimpulan yang ada nantinya diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Maka selanjutnya adalah sampai pada tahap kesimpulan akhir yang menggambarkan bagaimana penerapan SIMDA Keuangan dengan kesesuain berbasis akrual berdasarkan PP No.71 tahun 2010 di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual yang disajikan dalam bab selanjutnya.

3.5 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

Defenisi konseptual yang berupa konsep dalam penelitian ini digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Defenisi Konseptual dan Defenisi Operasional

Konsep dan Operasional	Dimensi	Indikator
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan	SIMDA Keuangan adalah sebuah aplikasi komputer untuk mengolah transaksi keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangannya dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan informasi yang cepat dan tepat.	Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 PSAP 01 – PSAP 12

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Aidi, Ahmadi. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. In Media.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Andini Kusuma Dewi. 2014. *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau)*. Jurnal
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuty Veronika Laura, Lintje Kalangi, Linda Lambey. 2017. *Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Kabupaten Maluku Tenggara*
- Azhar, Susanto. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan pertama. Lingga Jaya. Bandung
- Biduri, Sarwenda (2018) *Buku Ajar: Akuntansi Sektor Publik*. UMSIDA Press, Sidoarjo. ISBN 978-602-5914-20-1 Bumi Aksara.
- Dadang Suwanda dan Hendri Santosa. 2015. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua: Berpedoman Pada SAP*. Bandung: Rosda
- Dadang Suwanda, Hendri Sentosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Dra.H. Salidi Samsudin, M.M.M.Pd (2010) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Penerbit Pustaka Setia
- Edy Sutrisno, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke Enam. Pranada Media Group, Jakarta.Erlangga
- Erlina, Rasdianto, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Penerbit Brama Ardian

- Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Salemba Empat : Jakarta
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, H.Malayu, S.P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.
- Hasibuan,Dini Rahmi,2015.*Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua (Kasus Pada Pemerintah Kota Medan)*.Skripsi.FakultasEkonomi Dan BisnisUniversitas Sumatera Utara
- Herry,S.E, M.Si. (2012).*Analisis Laporan Keuangan*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hoesada, Jan, *Accrual Budgeting Dan Accrual Accounting Pada Pemerintahan NKRI*, Jurnal Akuntansi/ Tahun Xiv No.01 Januari 2010, 113:124
- I Made Sudana. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta :
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KSAP,Materi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Desember 2010
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mitami.2013. *Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan pada pemerintah daerah kabupaten pangkep*.
- Mohammad Alfian. 2014. *Analisis Faktor Pendukung Implemetasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD (penelitian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo*.
- Munandar, M. 2010. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE.
- Munandar (2012). *Pengertian Realisasi Anggaran*. Tersedia :

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-realisasi/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

Nawawi Hadari. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Gaol L, Jimmy. 2014. *A to Z Human Capital : Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Grasindo : Jakarta.

Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugraha (2013). *Analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara*.

Ole, Ryanlie Halens. 2014. *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Sinas PPKAD KABUPATEN Minahasa Tenggara*.

P. joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Ratmono.Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). "Akuntansi Keuangan Daerah Siregar,Baldric.2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Siregar,Baldric.2015.*Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sjahrial, Dermawan. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. SKPD. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.W., & Endrayanto, P. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Taswan. 2015. Akuntansi Perbankan. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

The International Business and Economics Research Journal, pp. 9-11

Tickell Geoffrey, 2010, "Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma".

Trivena Anastasia Rahantoknam, Jantje J. Tinangon, Lidya M. Mawikere. 2017.

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Widjajarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis AkruaI pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*.

CURRICULUM VITAE



Nama : Raja Aulia Devny Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : Batam / 27 Juli 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : Rajadevny@gmail.com

Alamat : Jl. D.I. PANJAITAN KM.7
PERUM. DELIMA INDAH No. 5

Riwayat Pendidikan : - TK Pembina Tanjungpinang
- SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari
- SMP Negeri 4 Tanjungpinang
- SMA Negeri 2 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang